

ANALISIS APBD DAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BATUBARA TAHUN 2015-2021

Empi Aura Kania¹, Nur Aulia Pratiwi²

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan^{1,2}
email: empikaniaa@gmail.com¹, nurtiwik123@gmail.com²

Abstrak

Dengan adanya otonomi daerah setiap daerah mewajibkan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pemberian kewenangan ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Kabupaten Batubara yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan yang dimekarkan pada tahun 2006 juga mengemban tanggung jawab untuk menjadi lebih mandiri dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat. Adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang menjadikan harus dilakukan analisis untuk mengukur sejauhmana Kabupaten Batubara dalam mengelola keuangan daerahnya terkhusus pada tahun 2015-2021. Tujuan dari penelitian untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Batubara sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian Kabupaten Batubara masih tergolong rendah sekali karena masih bergantung bantuan dari pemerintah pusat yang dibuktikan dengan hasil analisis rasio berada di interval 0-25%.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Analisis Rasio Keuangan Daerah

Abstract

With the existence of regional autonomy, each region is obliged to regulate and manage its area in accordance with applicable laws and regulations. The granting of this authority is realized by regulating the distribution and utilization of national resources as well as financial balances between the central government and regional governments. Batubara Regency, which was the result of division from Asahan Regency which was split in 2006, also has the responsibility to become more independent in managing and improving the financial performance of its government which will be accountable to the central government. The dependence of the local government on the central government requires an analysis to be carried out to measure how far Batubara Regency is in managing its regional finances, especially in 2015-2021. The purpose of this research is to measure the financial performance of the regional government of Batubara Regency as a benchmark in determining financial policies in the next fiscal year. The results of the study show that the independence of Batubara Regency is still very low because it still depends on assistance from the central government as evidenced by the results of ratio analysis in the interval 0-25%.

Keywords: Regional Autonomy, Analysis of Regional Financial Ratios

PENDAHULUAN

Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian menjadi UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian menjadi UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, era otonomi daerah dimulai di Indonesia. Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan otonomi daerah yang dimilikinya, daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola daerahnya. Daerah harus menjadi lebih mandiri sehingga mampu mengurangi ketergantungannya kepada pemerintah pusat. Setiap daerah mempunyai susunan pemerintahan yang disebut dengan pemerintah daerah dan kepala daerah yang diberi hak dan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah daerah sebagai suatu bentuk organisasi sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk menjalankan roda pemerintahan di lingkungan wilayah dan juga memiliki tugas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pemberian kewenangan ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, sesuai dengan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan kemampuan daerah tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan yang persentasenya lebih kecil kepada Pemerintah Pusat sehingga Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan Pemda.

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun terhitung tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dengan demikian, APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi ini menjadikan APBD penting karena kegiatan pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan jika tidak dicantumkan dalam APBD.

Oleh karena itu, dengan diberlakukannya otonomi daerah tersebut, Kabupaten Batubara yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan yang dimekarkan pada kurun tahun 2006 juga harus mengemban tanggung jawab untuk menjadi lebih mandiri dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahannya yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat bahkan masyarakat Kabupaten Batubara itu sendiri. Namun kenyataannya, masih terdapat juga daerah yang kurang mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri, daerah-daerah tersebut masih berketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Terlebih lagi, Kabupaten Batubara termasuk salah satu Kabupaten yang baru dibentuk di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, apakah Kabupaten yang tergolong baru dibentuk ini mampu mengelola keuangan daerahnya sendiri atau tidak. Untuk itu diperlukan analisis untuk mengukur sejauhmana Kabupaten Batubara dalam mengelola keuangan daerahnya terkhusus pada tahun 2015-2021.

Melalui penelitian ini akan dianalisis rasio keuangan untuk menilai kinerja pemerintah Kabupaten Batubara. Untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah tersebut perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel sehingga diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah

sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Analisis kinerja dapat dilakukan dengan menghitung rasio keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten Batubara. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Metode kepustakaan merupakan metode yang digunakan dengan membaca sejumlah buku, dokumen, data, informasi dan referensi yang berkaitan dengan tema penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang ada. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari internet. Data yang digunakan dalam penelitian bersifat data sekunder dengan pengumpulan data yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Batubara tahun 2015-2021 yang diambil dari website <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2016-2019&provinsi=02&pemda=22> dan didukung oleh data-data lainnya. Tahap-tahap analisis laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Batubara tahun 2015–2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menghitung rasio kemandirian
2. Menghitung rasio efektivitas dan efisiensi
3. Menghitung rasio aktivitas
4. Menghitung rasio derajat desentralisasi
5. Menghitung rasio pertumbuhan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kabupaten Batubara

Kabupaten Batu Bara merupakan Kabupaten hasil Pemekaran dari Kabupaten Asahan, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara. Ibukota Kabupaten Batu Bara berada di Kecamatan Lima Puluh. Kabupaten Batu Bara terdiri dari 7 Kecamatan yaitu Medang Deras, Sei Suka, Air Putih, Lima Puluh, Talawi, Tanjung Tiram dan Sei Balai. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Batu Bara bahwa Kabupaten Batu Bara telah dimekarkan menjadi 5 (lima) kecamatan yaitu Datuk Tanah Datar, Datuk Lima Puluh, Lima Puluh Pesisir, Nibung Hangus dan Laut Tador. Sehingga Kabupaten Batu Bara menjadi 12 (dua belas) kecamatan.

Struktur Perekonomian di Kabupaten Batu Bara didominasi oleh Sektor Industri Pengolahan, hal ini berkaitan dengan adanya perusahaan pengelolaan biji aluminium, serta pengelolaan hasil perkebunan seperti pengolahan minyak kelapa sawit dan karet (crumb rubber). Kabupaten Batu Bara merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam yang sangat kaya dan potensial, namun belum dapat dikelola secara optimal karena belum adanya sarana pendukung seperti kurangnya infrastruktur dan sarana lainnya, misalkan banyak daerah pariwisata yang belum dikelola dengan baik dan adanya bekas lahan pertambangan yang saat ini kosong namun apabila dikelola dengan baik dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batu Bara. Pembangunan daerah harus diarahkan pada strategi dan sasaran tertentu yang hendak dicapai, dengan menyusun arah kebijakan pembangunan yang jelas berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan daerah yang mempertimbangkan aspirasi masyarakat, kondisi dan kemampuan daerah, termasuk

kinerja pelayanan pemerintah pada tahun – tahun sebelumnya. Tujuan strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Batubara dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Menuju tata Pemerintahan yang Goods Governance.
2. Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. Meningkatkan Ekonomi & kesejahteraan masyarakat.
4. Memberi pelayanan prima kepada masyarakat.
5. Melaksanakan pembangunan fasilitas pemerintahan, jalan akses ke pusat
6. Pemerintahan, jalan dan jembatan ke daerah terpencil

Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Batubara

1) Rasio Kemandirian Kabupaten Batubara

Tabel 1. Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2015-2021

TAHUN ANGGARAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (MILYAR)	PENDAPATAN TRANSFER (MILYAR)	RKKD (%)	KETERANGAN	POLA HUBUNGAN
2015	51,51	989,46	5,15%	Rendah Sekali	Instruktif
2016	59,39	1.033,24	5,74%	Rendah Sekali	Instruktif
2017	66,94	944,18	7,08%	Rendah Sekali	Instruktif
2018	64,39	936,5	7,24%	Rendah Sekali	Instruktif
2019	129,22	919,11	14,05%	Rendah Sekali	Instruktif
2020	166,02	994,63	16,69%	Rendah Sekali	Instruktif
2021	174,55	939,5	18,57%	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber Data: djpk.kemenkue (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada rasio kemandirian keuangan daerah Kab. Batubara menunjukkan bahwa pendapatan atau bantuan dari pihak eksternal dalam hal ini berupa bantuan pemerintah provinsi maupun pusat selalu mengalami kenaikan dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Terlihat pada tahun 2015 rasio kemandirian sebesar 5,15% kemudian pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 5,74%, pada tahun 2017 juga mengalami kenaikan sebesar 7,08%, selanjutnya pada tahun 2018 juga mengalami kenaikan sebesar 14,05% kemudian naik lagi pada tahun 2019 sebesar 14,05% dan naik lagi pada tahun 2020 sebesar 16,69% dan selanjutnya naik pada tahun 2021 sebesar 18,57%. Pada kenyataannya, walaupun persentase rasionya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, namun pola kemandirian keuangannya masih tergolong pola hubungan instruktif karena masih tergolong dalam interval 0-25% dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah itu sendiri yaitu pemerintah Kab.Batubara.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kab. Batubara selama tujuh tahun terakhir memiliki rata-rata kemandiriannya yang masih tergolong rendah sekali dan dikategorikan pola hubungan instruktif, pola hubungan ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat lebih tinggi atau dominan dibandingkan pemerintah daerah, karena masih tergolong di interval 0-25%.

Berarti tingkat kemandirian Kab. Batubara sangat kecil sekali. Dan ini menggambarkan bahwa pemerintah Kab. Batubara masih rendah dalam mengelola kemampuan keuangan daerah, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal masih sangat tinggi sehingga dalam pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat bergantung bantuan dari pemerintah pusat.

2) RASIO EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KAB.BATUBARA

A. RASIO EFEKTIVITAS PAD KABUPATEN. BATUBARA

Tabel 2. Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2016-2021

TAHUN ANGGARAN	REALISASI PAD (MILYAR)	ANGGARAN PAD (MILYAR)	RE (%)	KETERANGAN
2015	51,51	43,36	118,79%	SANGAT EFEKTIF
2016	59,39	50,43	117,76%	SANGAT EFEKTIF
2017	66,94	51,59	129,75%	SANGAT EFEKTIF
2018	64,39	63,23	101,83%	SANGAT EFEKTIF
2019	129,22	90,41	142,95%	SANGAT EFEKTIF
2020	166,02	175,91	94,37%	CUKUP EFEKTIF
2021	174,55	144,83	120,52%	SANGAT EFEKTIF

Sumber Data: djpk.kemenkue (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada rasio efektivitas PAD dapat diketahui bahwa anggaran PAD Kabupaten Batubara cenderung rata-rata naik dari tahun ke tahun. Berdasarkan perhitungan pada rasio efektivitas PAD dapat diketahui bahwa efektivitas PAD Kabupaten Batubara pada tahun 2015 sebesar 118,79%, kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 117,76%, kemudian naik pada tahun 2017 sebesar 129,75%, dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2018 sebesar 101,83%, selanjutnya naik lagi pada tahun 2019 sebesar 142,95%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup jauh sebesar 94,37% dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 120,52%. Efektivitas kinerja keuangan Kabupaten Batubara untuk tahun 2015-2021 tergolong efektif karena hasilnya menunjukkan di atas 100%.

Menurut uraian dan hasil perhitungan rasio efektivitas PAD Kabupaten Batubara sudah efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 118% dan tergolong sangat efektif. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Batubara juga dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah

direncanakan. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Batubara harus terus mengoptimalkan kinerjanya agar apa yang rencanakan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemerintah Kabupaten Batubara dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan sudah berjalan dengan sangat efektif.

B. RASIO EFISIENSI PAD KABUPATEN BATUBARA

Tabel 3. Perhitungan Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2015-2021

TAHUN ANGGARAN	REALISASI BELANJA DAERAH (MILYAR)	REALISASI PENDAPATAN (MILYAR)	RE (%)	KETERANGAN
2015	385,72	918,90	41,19%	Sangat Efisien
2016	974,98	1092,63	89,23%	Cukup Efisien
2017	848,48	1063,56	79,77%	Efisien
2018	802,12	1053,23	76,15%	Efisien
2019	989,34	1192,72	82,94%	Cukup Efisien
2020	910,5	1179,67	77,18%	Efisien
2021	979,5	1168,63	83,81%	Cukup Efisien

Sumber Data: djpk.kemenkue (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada rasio efisiensi keuangan daerah diketahui realisasi total pendapatan daerah Kabupaten Batubara dari tahun 2015 sampai dengan 2021 mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 pendapatan daerah Kabupaten Batubara sebesar 918,90 M, kemudian naik menjadi 1092,63M pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan menjadi 1063,56 M dan 1053,23M. Kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1192,72M dan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan menjadi 1179,67 M dan 1168,63M.

Berdasarkan perhitungan pada rasio efisiensi keuangan daerah juga diketahui bahwa rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Batubara dari tahun 2015-2021 sebesar 75,75% atau dapat dikatakan efisien karena berada di interval 60%-80%. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Batubara untuk memperoleh pendapatannya tidak terlalu besar. Sehingga dapat dikatakan kinerja pemerintah Kabupaten Batubara dalam hal ini sudah cukup baik karena sudah dapat menekan jumlah belanja daerahnya.

3) RASIO AKTIVITAS

A. RASIO BELANJA MODAL/BELANJA TIDAK LANGSUNG

Tabel 4. Perhitungan Rasio Belanja Modal Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2015-2021

TAHUN ANGGARAN	BELANJA OPERASI (MILYAR)	BELANJA DAERAH (MILYAR)	BO(%)
2015	517,61	903,32	57,30%
2016	153,47	1.128,45	13,60%
2017	217,41	1.065,89	20,39%
2018	194,30	996,42	19,49%
2019	208,49	1.197,83	17,40%
2020	300,63	1.211,13	24,82%
2021	226,53	1.206,03	18,78%

Sumber Data: djpk.kemenkue (diolah)

B. RASIO BELANJA OPERASI/BELANJA LANGSUNG

Tabel 5. Perhitungan Rasio Belanja Operasi Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2015-2021

TAHUN ANGGARAN	BELANJA OPERASI (MILYAR)	BELANJA DAERAH (MILYAR)	BO(%)
2015	385,72	903,32	42,70%
2016	974,98	1.128,45	86,39%
2017	848,48	1.065,89	79,60%
2018	802,12	996,42	80,50%
2019	989,34	1.197,83	82,59%
2020	910,5	1.211,13	75,17%
2021	979,5	1.206,03	81,21%

Sumber Data: djpk.kemenkue (diolah)

Rasio aktivitas dibagi menjadi dua yaitu rasio belanja modal dan rasio belanja operasi. Rasio belanja modal Kabupaten Batubara dari tahun 2015-2021 mengalami naik-turun. Dimulai dari tahun 2015 rasionya sebesar 57,30%, kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 13,60%, dan ditahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 20,39% ditahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 19,49% dan 17,40%, kemudian naik ditahun 2020 menjadi 24,82% dan tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 18,78%.

Rasio belanja operasi Kabupaten Batubara dari tahun 2015-2021 mengalami perkembangan yang naik dan turun juga. Dimulai dari tahun 2015 rasionya sebesar 42,70%, kemudian pada tahun 2016 naik menjadi 86,39%, kemudian naik dari tahun 2018 dan 2019 menjadi 80,50% dan 82,59%, kemudian ditahun 2020 mengalami penurunan menjadi 75,17% dan naik ditahun 2021 menjadi 81,21%.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi saja sehingga rasio belanja modal relatif lebih kecil dari rasio belanja operasi. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi dikarenakan oleh belanja pegawai yang relatif besar, pemerintah Kabupaten Batubara cenderung lebih banyak mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran rutin untuk memenuhi pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Batubara cenderung berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk pemerintah Kabupaten Batubara kecil dan belum terpenuhi. Maka dari itu, diharapkan kedepannya pemerintah Kab Batubara lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah akan lebih terjamin.

4) RASIO DERAJAT DESENTRALISASI

Tabel 6. Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2015-2021

TAHUN ANGGARAN	REALISASI PAD (MILYAR)	TOTAL PENDAPATAN DAERAH (MILYAR)	PD (%)	KETERANGAN
2015	51,51	918,90	5,60%	SANGAT KURANG
2016	59,39	1.092,63	5.43%	SANGAT KURANG
2017	66,94	1.063,56	6,29%	SANGAT KURANG
2018	64,39	1.053,23	6,11%	SANGAT KURANG
2019	129,22	1.192,72	10,83%	KURANG
2020	166,02	1.179,67	14,07%	KURANG
2021	174,55	1.168,63	14,93%	KURANG

Sumber Data: djpk.kemenkue (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada rasio derajat desentralisasi diketahui realisasi total pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Batubara dari tahun 2015 sampai dengan 2021 sangat rendah. Terlihat dari persentase rasio setiap tahunnya pada 2015-2021 persentase rasio yang didapatkan kurang dari 50. Jadi, dapat disimpulkan bahwa rata-rata derajat desentralisasi keuangan daerah Kabupaten Batubara dari tahun 2015-2021 sebesar 9,03% atau dapat dikatakan sangat kurang baik karena berada di interval <50%. Artinya kurang tinggi kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Batubara yang didapatkan pemerintah daerah sehingga kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi secara mandiri.

5) RASIO PERTUMBUHAN KAB. BATUBARA

Tabel 7. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2015-2021

KETERANGAN	TAHUN								
	2014 (M)	2015 (M)	2016 (M)	2017 (M)	2018 (M)	2019 (M)	2020 (M)	2021 (M)	RATA - RATA
PAD	45,22	51,51	59,39	66,94	64,39	129,22	166,02	174,55	
PERTUMBUHAN PAD		13,90%	15,29%	12,71%	-3,80%	100,68%	28,47%	5,13%	24,61%
PENDAPATAN	878,50	918,90	1092,63	1063,56	1053,23	1192,72	1179,67	1168,63	
PERTUMBUHAN PENDAPATAN		4,59%	18,90%	-2,66%	-0,96%	13,24%	-1,09%	-0,93%	4,44%
BELANJA OPERASI	393,92	385,72	974,98	848,48	802,12	989,34	910,5	979,5	
PERTUMBUHAN BELANJA OPERASI		-2,08%	152,76%	-12,97%	-5,46%	23,34%	-7,96%	7,57%	22,17%
BELANJA MODAL	397,58	517,61	153,47	217,41	194,30	208,49	300,63	226,53	
PERTUMBUHAN BELANJA MODAL		30,19%	-70,35%	41,66%	-10,62%	7,30%	44,19%	-24,64%	2,53%

Sumber Data: djpk.kemenkue (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada rasio pertumbuhan PAD dapat diketahui bahwa pertumbuhan PAD Kabupaten Batubara mengalami naik turun. Dilihat pada tahun 2015 pertumbuhan PAD sebesar 13,90% kemudian naik di tahun 2016 sebesar 15,29% dan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 12,71% kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat buruk karena pertumbuhannya negatif sebesar -3,80% dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 100,68% selanjutnya pada tahun 2020 turun sebesar 28,47% dan pada tahun 2021 menjadi 5,13%. Sehingga rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Batubara dari tahun 2015-2021 sebesar 24,61%. Pertumbuhan PAD tertinggi terjadi pada tahun 2019

Berdasarkan perhitungan pada rasio pendapatan dapat diketahui bahwa pertumbuhan pendapatan Kabupaten Batubara mengalami naik turun. Pada tahun 2015 pertumbuhan pendapatan sebesar 4,59%, kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 18,90% kemudian mengalami penurunan yang buruk di tahun 2017 dan 2018 menjadi -2,66% dan -0,96% pertumbuhan pendapatan pada 2 tahun ini bersifat negatif, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang bagus positif bersifat sebesar 13,24%, dan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang buruk karena bersifat negatif sebesar -1,09% dan -0,93%. Sehingga rata-rata pertumbuhan pendapatan pada Kabupaten Batubara dari tahun 2015-2021 sebesar 4,44% pertumbuhan pendapatan Kabupaten Batubara ini tergolong rendah.

Berdasarkan perhitungan pada rasio belanja operasi diketahui bahwa pertumbuhan belanja operasi Kabupaten Batubara mengalami pertumbuhan yang naik turun bahkan bersifat positif maupun negatif. Pertumbuhan belanja operasi tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 152,76%. Dan pertumbuhan terendah sebesar -2,08%. Sehingga rata-rata pertumbuhan belanja operasi Kabupaten Batubara sebesar 22,17%

Berdasarkan perhitungan pada rasio belanja modal diketahui bahwa pertumbuhan belanja modal Kabupaten Batubara sama seperti pertumbuhan belanja operasi mengalami naik turun. Pertumbuhan belanja modal tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 44,19% dan pertumbuhan belanja modal terendah terjadi pada tahun -10,62%. Sehingga rata-rata pertumbuhan belanja modal Kabupaten Batubara sebesar 2,53%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian keuangan daerah Kab. Batubara selama tujuh tahun terakhir memiliki rata-rata kemandiriannya yang masih tergolong rendah sekali dan dikategorikan pola hubungan instruktif, pola hubungan ini menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat lebih tinggi atau dominan dibandingkan pemerintah daerah, karena masih tergolong di interval 0-25%.
2. Rasio efektivitas PAD Kabupaten Batubara sudah efektif karena rata-rata efektivitasnya di atas 100% yaitu 118% dan tergolong sangat efektif. Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya.
3. Rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Batubara dari tahun 2015-2021 sebesar 75,75% atau dapat dikatakan efisien karena berada di interval 60%-80%. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Batubara untuk memperoleh pendapatannya tidak terlalu besar.
4. Rasio aktivitas dibagi menjadi dua yaitu rasio belanja modal dan rasio belanja operasi. Rasio belanja modal dan operasi Kabupaten Batubara dari tahun 2015-2021 mengalami naik-turun. Berdasarkan hasil analisis sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi saja sehingga rasio belanja modal relatif lebih kecil dari rasio belanja operasi.
5. Rasio derajat desentralisasi Kabupaten Batubara dari tahun 2015- 2021 sangat rendah. Persentase rasio yang didapatkan kurang dari 50. Artinya kurang tinggi kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Batubara yang didapatkan pemerintah daerah sehingga kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi secara mandiri.
6. Rasio pertumbuhan keuangan daerah Kabupaten Batubara yang dimulai dari pertumbuhan PAD, pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan belanja operasi, dan pertumbuhan belanja modal selalu naik turun. Keadaan ini disebabkan karena belum stabilnya kondisi keuangan daerah Kabupaten Batubara

Adapun saran yang bisa diberikan penulis terhadap penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Batubara harus mengurangi ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat dengan cara mengoptimalkan dan mengelola potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Batubara.
2. Pemerintah Kabupaten Batubara harus bisa mengelola dana belanja operasi dan modal sama rata sehingga tidak terjadi ketimpangan dengan cara mementingkan hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

3. Pemerintah Kabupaten Batubara harus bisa meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah agar pertumbuhan keuangan daerah lebih stabil dengan cara memberikan pelatihan kepada para jajarannya agar mampu meningkatkan kualitas kinerjanya.

REFERENSI

- Amalia, H. R., & Pratiwi, B. Y. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2018-2020. *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, 2(1), 72-81.
- Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 83-93.
- Budianto, A. ANALISIS RASIO KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2016-2020.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Ebbank*, 8(1), 33-48.
- Imani, R. (2016). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 6(2).
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta